

# PENGISIAN FORM PEMBERHENTIAN UNDUR DIRI PPNS PENGAJUAN OLEH KEMENTERIAN/LEMBAGA

## HALAMAN UTAMA



Keterangan : Pada gambar diatas adalah halaman awal dari Pembuatan Sistem Informasi PPNS, dimana para user atau pengguna akses terlebih dahulu ke <http://ppns.ahu.go.id/> maka akan tampil halaman diatas.

## HALAMAN LOGIN



# FORM PENAMBAHAN NOMOR SURAT

PPNS

1452

Perindungan Konsumen

Beranda / Daftar Verifikasi Administrasi

### Nomor Surat Pemberhentian Undur Diri PPNS

Kementerian Lembaga \*  
Kementerian Perdagangan

Instansi \*  
Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Nomor Surat \*  
MASUKKAN NOMOR SURAT

Tanggal  
MASUKKAN TANGGAL SURAT

Perihal  
MASUKKAN PERIHAL

Nama Pengusul \*  
MASUKKAN NAMA PEJABAT SESUAI DENGAN SURAT PERMOHONAN

Jabatan Pengusul \*  
MASUKKAN JABATAN PEJABAT YANG SESUAI DENGAN SURAT PERMOHONA

Upload Surat Permohonan \*  
(Ekstensi PDF, besar File Maksimal 10 MB)

Pilih File Tidak ada file yang dipilih

BATAL SIMPAN

Keterangan : Pada gambar diatas adalah Form input penomoran surat Pemberhentian PPNS. Dimana Kementerian/Lembaga harus memasukkan nomor, tanggal dan perihal yang tercantum pada surat pengajuan dan upload surat permohonan tersebut. Lalu klik tombol **SIMPAN** jika sudah selesai penginputan. Atau klik Tombol Batal **BATAL** untuk kembali ke Halaman Daftar Verifikasi PPNS

## DAFTAR PEMOHON

No.	Nomor Surat	Nama	NIP	Pangkat/Golongan	Status	Aksi
1	[redacted]	[redacted]	[redacted]	Penata Muda III/a	Data Baru	<a href="#">Edit Data</a> <a href="#">Hapus Data</a>

Keterangan : Pada gambar diatas adalah Halaman Daftar Pemohon, dimana user kementerian/lembaga bisa mengklik tombol **+ TAMBAH PEMBERHENTIAN PPNS** untuk menambahkan input peserta yang ada. Jika sudah dilakukan penginputan tetapi masih ada data yang salah user bisa mengklik “EDIT DATA” tetapi jika sudah selesai meginput form pengisian dan yakin, user bisa mengklik tombol **KIRIM DATA UNTUK VERIFIKASI** maka data yang sudah dikirim akan langsung diverifikasi oleh tim dan tidak bisa di edit kembali.

## FORM PENGISIAN

### Pemberhentian Undur Diri PPNS

Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, Kementerian Perdagangan  
Nomor Surat : fdshfsdhfsd78321test

---

Cari Data PPNS

---

Permohonan Dibawah 2010

<b>Nama *</b> <small>Masukkan Nama</small>	<b>NIP *</b> <small>Masukkan NIP</small>	<b>Gelar Depan</b> <small>Masukkan Gelar depan</small>
<input type="button" value="+"/>		
<b>Gelar Belakang</b> <small>Masukkan Gelar belakang</small>	<b>Jabatan *</b> <small>Masukkan Jabatan</small>	<b>Pangkat/Golongan *</b> <small>--PILH--</small>
<input type="button" value="+"/>		
<b>Jenis Kelamin *</b> <small>--PILH--</small>		

---

#### Wilayah Kerja

<b>Provinsi *</b> <small>--PILH--</small>	<b>Kabupaten/Kotamadya *</b>	<b>Kecamatan</b>
<b>Kementerian/LPKN *</b> <small>Kementerian Perdagangan</small>	<b>Unit *</b> <small>Direktorat Jenderal Standarisasi</small>	<b>Nama Wilayah Kerja Unit/PT</b> <small>masukkan nama unit pelaksana teknis Disisi Jika Wilayah Kerja Menyebutkan Nama Unit/PT</small>

**UU di Kawal \***  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;  
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821) a

---

**A. SK Pengangkatan Pejabat PPNS**

Nomor SK Pengangkatan PNS \* Masukkan Nomor SK Pengangkatan

Tanggal SK Pengangkatan PNS \* Masukkan Tanggal Sk Pengangkatan

**B. SK Kenaikan Pangkat**

Nomor SK Kenaikan Pangkat \* Masukkan Nomor SK Kenaikan Pangkat

Tanggal SK Kenaikan Pangkat \* Masukkan Tanggal SK Kenaikan Pangkat

**C. KTP PPNS**

Nomor KTP \* Masukkan Nomor KTP

Tanggal Berlaku KTP \* Masukkan Tanggal Berlaku KTP

**D. Persetujuan Dari Instansi Yang Bersangkutan**

Nomor SK Persetujuan Masukkan Nomor SK Persetujuan

Tanggal SK Persetujuan Masukkan Tanggal SK Persetujuan

**E. Permohonan Pemberhentian PPNS**

Nomor SK Pemberhentian Masukkan Nomor SK Pemberhentian

Tanggal SK Pemberhentian Masukkan Tanggal SK Pemberhentian

---

**PERSYARATAN UPLOAD DOKUMEN**  
(Ekstensi PDF besar file maksimum 10 MB)

Melampirkan Fotocopy keputusan tentang pengangkatan pejabat PPNS  
 Tidak ada file yang dipilih \*File Harus Berupa PDF.

Melampirkan Fotocopy keputusan tentang kenaikan pangkat PNS terakhir yang dilegalisir  
 Tidak ada file yang dipilih \*File Harus Berupa PDF.

Tidak ada file yang dipilih \*File Harus Berupa PDF.

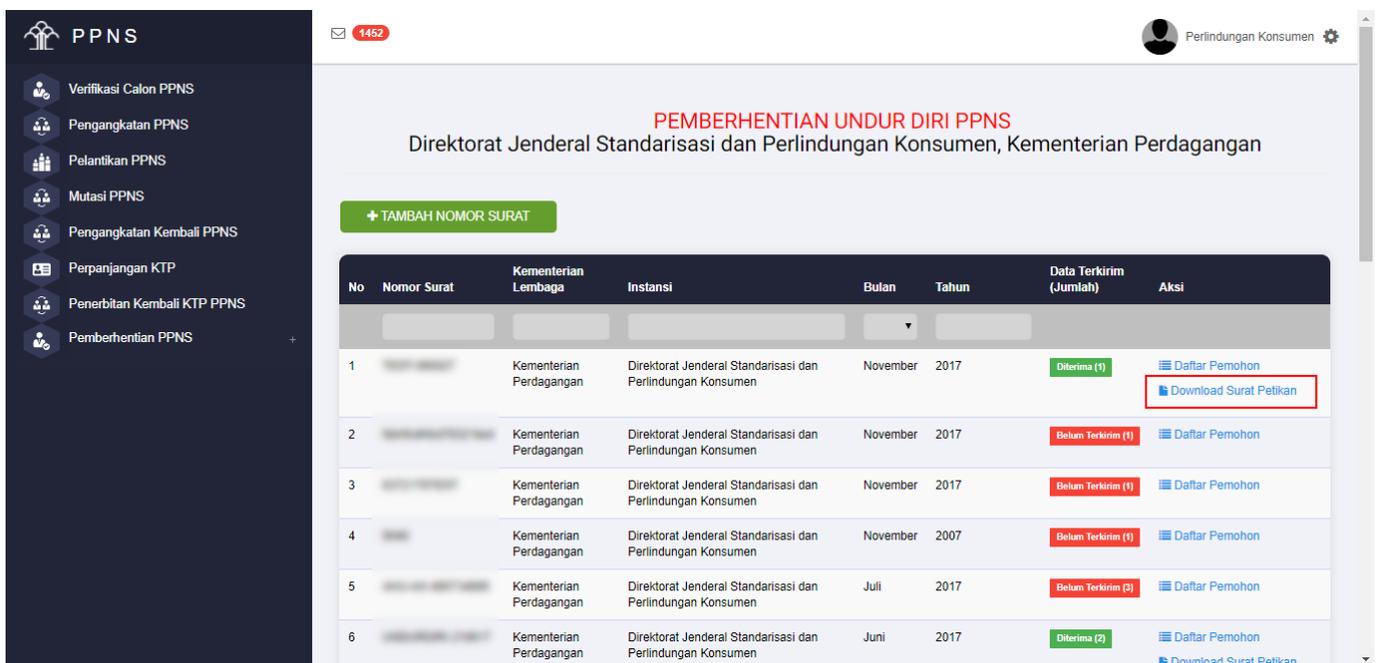
Melampirkan Surat persetujuan dari instansi yang bersangkutan  
 Tidak ada file yang dipilih \*File Harus Berupa PDF.

Melampirkan Surat Permohonan Pemberhentian PPNS  
 Tidak ada file yang dipilih \*File Harus Berupa PDF.

Dokumen fisik tidak perlu dikirim ke Kementerian Hukum & HAM, Dokumen fisik wajib disimpan kepada masing-masing instansi pemohon

Keterangan : Pada gambar diatas adalah Form penginputan pengajuan transaksi Pemberhentian PPNS. Dimana user menginput sesuai dengan data yang ada. Pada wilayah kerja klik tombol **TAMBAH DATA** untuk menambahkan wilayah lebih dari satu. Pada persyaratan masukkan lampiran yang berbentuk "PDF" klik pada tombol "BROWSE". Jika form sudah diisi semua, klik tombol **SIMPAN** untuk menyimpan datanya, jika masih belum yakin klik tombol **KEMBALI** untuk kembali ke halaman daftar transaksi.

## DOWNLOAD SURAT PEMBERHENTIAN PPNS



The screenshot shows the PPNS application interface. On the left is a dark sidebar menu with options: Verifikasi Calon PPNS, Pengangkatan PPNS, Pelantikan PPNS, Mutasi PPNS, Pengangkatan Kembali PPNS, Perpanjangan KTP, Penerbitan Kembali KTP PPNS, and Pemberhentian PPNS. The main content area is titled "PEMBERHENTIAN UNDUR DIRI PPNS" and "Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, Kementerian Perdagangan". It features a "+ TAMBAH NOMOR SURAT" button and a table of transactions. The table has columns for No, Nomor Surat, Kementerian Lembaga, Instansi, Bulan, Tahun, Data Terkirim (Jumlah), and Aksi. The first row is highlighted, and the "Download Surat Petikan" link in the Aksi column is circled in red.

No	Nomor Surat	Kementerian Lembaga	Instansi	Bulan	Tahun	Data Terkirim (Jumlah)	Aksi
1		Kementerian Perdagangan	Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	November	2017	Diterima (1)	Daftar Pemohon Download Surat Petikan
2		Kementerian Perdagangan	Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	November	2017	Belum Terkirim (1)	Daftar Pemohon
3		Kementerian Perdagangan	Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	November	2017	Belum Terkirim (1)	Daftar Pemohon
4		Kementerian Perdagangan	Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	November	2007	Belum Terkirim (1)	Daftar Pemohon
5		Kementerian Perdagangan	Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Juli	2017	Belum Terkirim (3)	Daftar Pemohon
6		Kementerian Perdagangan	Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Juni	2017	Diterima (2)	Daftar Pemohon Download Surat Petikan

Keterangan : Pada gambar diatas adalah Form download surat hasil keluaran Pemberhentian PPNS. Klik pada Aksi "Download Surat Petikan" pada login Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

From:  
<http://panduan.ahu.go.id/> - **AHU ONLINE**

Permanent link:  
[http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=pemberhentian\\_ppns\\_karena\\_undur\\_diri&rev=1512533492](http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=pemberhentian_ppns_karena_undur_diri&rev=1512533492)

Last update: **2017/12/06 04:11**